



BERITA RESMI STATISTIK

No. 84/08/Th. XXIX, 31 Agustus 2026



Backlog Perumahan dan Capaian Penyediaan Perumahan di Indonesia, 2025–Semester I 2026

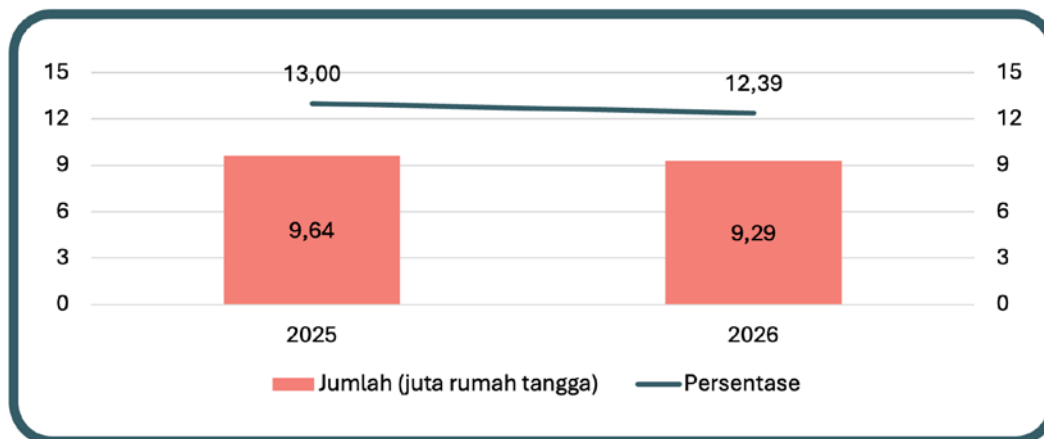
- **Backlog 1 (Backlog Kepemilikan)** menurun dari 13,00 persen (9,64 juta rumah tangga) pada tahun 2025 menjadi 12,39 persen (9,29 juta rumah tangga) pada tahun 2026.
- **Backlog 2 (Backlog Kelayakhunian)** menurun dari 25,33 persen (18,77 juta rumah tangga) pada tahun 2025 menjadi 24,03 persen (18,01 juta rumah tangga) pada tahun 2026.



- *Backlog 1 (Backlog Kepemilikan)* menurun dari 13,00 persen (9.637.157 rumah tangga) pada tahun 2025 menjadi 12,39 persen (9.289.047 rumah tangga) pada tahun 2026.
- *Backlog 2 (Backlog Kelayakhunian)* menurun dari 25,33 persen (18.771.908 rumah tangga) pada tahun 2025 menjadi 24,03 persen (18.009.146 rumah tangga) pada tahun 2026.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat dari 68,40 persen pada tahun 2025 menjadi 70,30 persen pada tahun 2026. Peningkatan juga terjadi pada seluruh komponen penyusun rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan dari 87,10 persen menjadi 87,52 persen, kecukupan luas lantai per kapita dari 94,66 persen menjadi 94,91 persen, akses air minum layak dari 93,22 persen menjadi 93,71 persen, dan akses sanitasi layak dari 85,37 persen menjadi 86,73 persen.
- Pada semester I-2026, capaian BSPS/Bedah Rumah sebanyak 88.635 unit, pembangunan rumah susun sebanyak 240 unit, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah oleh Kementerian/Lembaga sebanyak 47 unit, serta pembangunan perumahan dengan pembiayaan APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebanyak 4.014 unit dan 24.334 unit. Capaian FLPP sebanyak 91.531 unit, PPN DTP sebanyak 9.618 unit, pelonggaran GWM BI sebanyak 26.245 debitur, Pembiayaan Mikro Perumahan sebanyak 70.259 unit, dan Kredit Program Perumahan sebanyak 95.878 debitur. Capaian pembebasan retribusi PBG sebanyak 101.034 unit. Sementara itu, capaian gotong royong, program CSR dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya sebanyak 2.560 unit.

1. Backlog 1

Backlog kepemilikan rumah atau *backlog 1*, menunjukkan penurunan pada periode 2025–2026. Pada tahun 2026, persentase *backlog 1* tercatat sebesar 12,39 persen (9,29 juta rumah tangga), menurun dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 13,00 persen (9,64 juta rumah tangga).



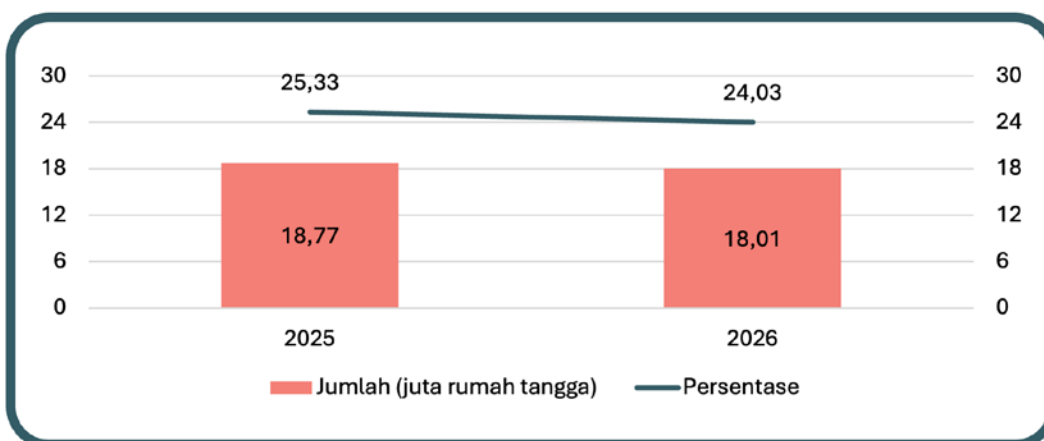
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 1 *Backlog 1, 2025–2026*

Menurut provinsi, pada tahun 2026, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan persentase *backlog 1* tertinggi, yaitu 39,36 persen, sedangkan Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan persentase terendah sebesar 1,39 persen. Sementara itu, dari sisi jumlah rumah tangga, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah *backlog 1* terbesar, yaitu sekitar 2,03 juta rumah tangga.

2. Backlog 2

Backlog kelayakhunian atau *backlog 2* di Indonesia menunjukkan penurunan pada periode 2025–2026. Pada tahun 2026, persentase *backlog 2* tercatat sebesar 24,03 persen (18,01 juta rumah tangga), menurun dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 25,33 persen (18,77 juta rumah tangga). Meskipun mengalami penurunan, angka *backlog 2* pada tahun 2026 hampir



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

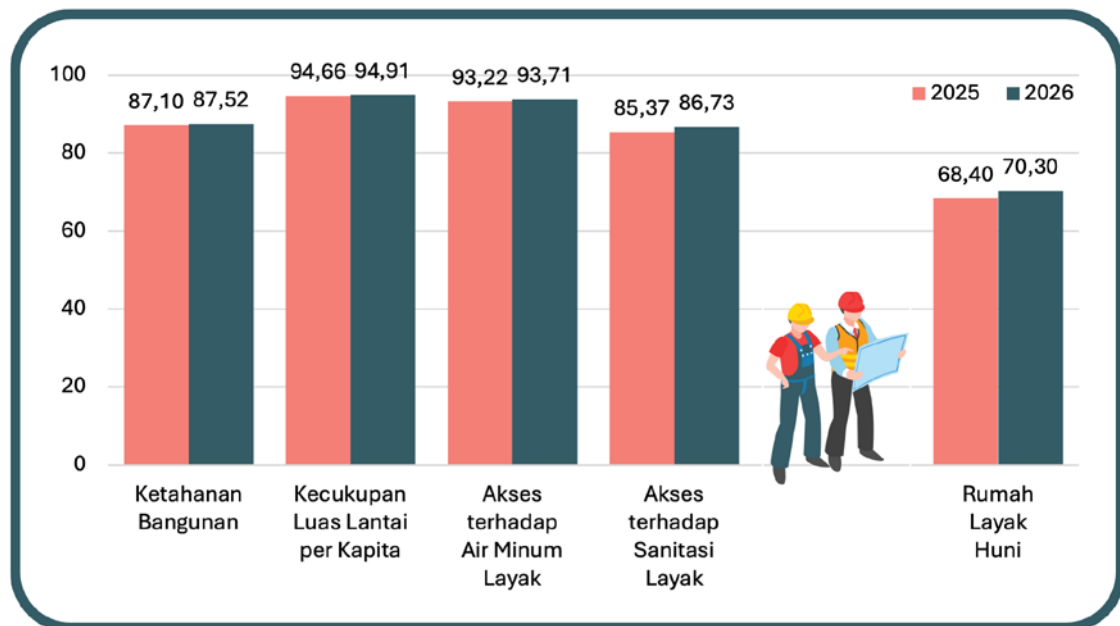
Gambar 2 *Backlog 2, 2025–2026*

dua kali lebih tinggi dibandingkan *backlog* 1, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas rumah yang telah ada menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

Penurunan *backlog* 2 terjadi di hampir seluruh provinsi, kecuali Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan. Pada tahun 2026, persentase *backlog* 2 tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 91,76 persen, sedangkan yang terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,92 persen.

2.1 Rumah Layak Huni Menurut Komponen Penyusunnya

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat dari 68,40 persen pada tahun 2025 menjadi 70,30 persen pada tahun 2026. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pada seluruh komponen penyusun rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni Menurut Komponen Penyusun, 2025–2026

Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan meningkat dari 87,10 persen pada tahun 2025 menjadi 87,52 persen pada tahun 2026. Salah satu karakteristik bahan bangunan yang berkaitan dengan ketahanan bangunan adalah bahan atap rumah terluas. Pada tahun 2026, sebanyak 9,34 persen rumah tangga menggunakan asbes sebagai bahan atap rumah terluas.

Selanjutnya, dari sisi kecukupan luas lantai per kapita, persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria meningkat dari 94,66 persen pada tahun 2025 menjadi 94,91 persen pada tahun 2026. Sebagian besar provinsi memiliki persentase di atas 80 persen. Tiga provinsi dengan persentase di bawah 80 persen adalah Provinsi Papua Tengah sebesar 79,33 persen, Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,59 persen, dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 74,44 persen.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat dari 93,22 persen pada tahun 2025 menjadi 93,71 persen pada tahun 2026. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 33,32 persen. Sebagian besar provinsi lainnya telah memiliki persentase akses air minum layak di atas 80 persen.

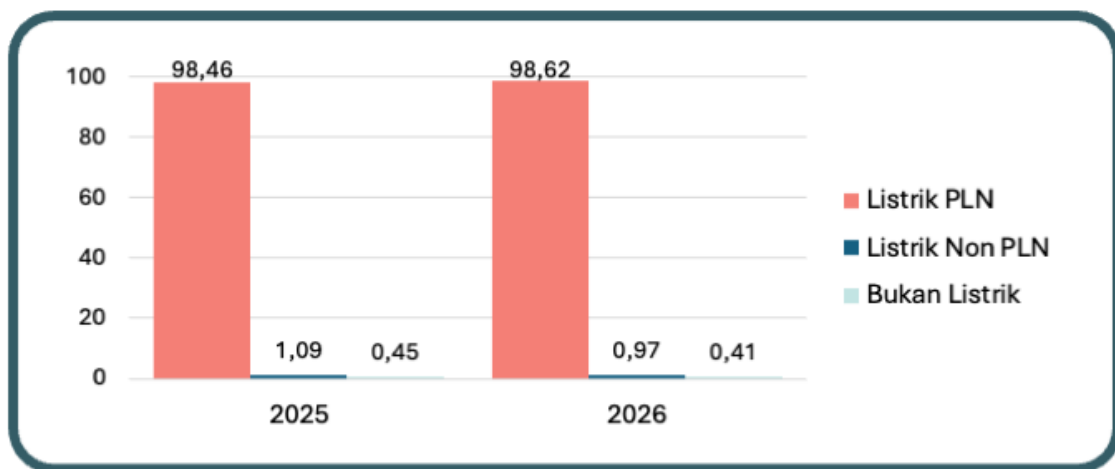
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 85,37 persen pada tahun 2025 menjadi 86,73 persen pada tahun 2026. Persentase akses sanitasi layak di sebagian besar provinsi telah mencapai lebih dari 80 persen, namun persentase di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan masing-masing sebesar 41,19 persen dan 17,98 persen. Salah satu tantangan yang dihadapi di bidang sanitasi adalah masih adanya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Pada tahun 2026, persentase rumah tangga yang BABS tercatat sebesar 2,15 persen.

Secara keseluruhan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2026 menunjukkan variasi antarprovinsi, dengan persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 89,13 persen dan terendah di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,30 persen.

2.2 Akses terhadap Listrik

Listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam hunian karena mendukung berbagai aktivitas rumah tangga, seperti penerangan, penggunaan peralatan rumah tangga, kegiatan belajar, serta aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil Susenas Maret, sumber utama penerangan dapat digunakan untuk menggambarkan akses rumah tangga terhadap listrik.

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan meningkat dari 98,46 persen pada tahun 2025 menjadi 98,62 persen pada tahun 2026. Pada periode yang sama, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN menurun dari 1,09 persen menjadi 0,97 persen, dan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik menurun dari 0,45 persen menjadi 0,41 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2025–2026

3. Kinerja Sektor Perumahan

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mengurangi *backlog* perumahan nasional. Program yang terdiri atas pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah ini, mengusung semangat kolaborasi berbagai pihak, mulai dari negara, pengembang perumahan, pelaku usaha, organisasi sosial, hingga swadaya masyarakat itu sendiri.

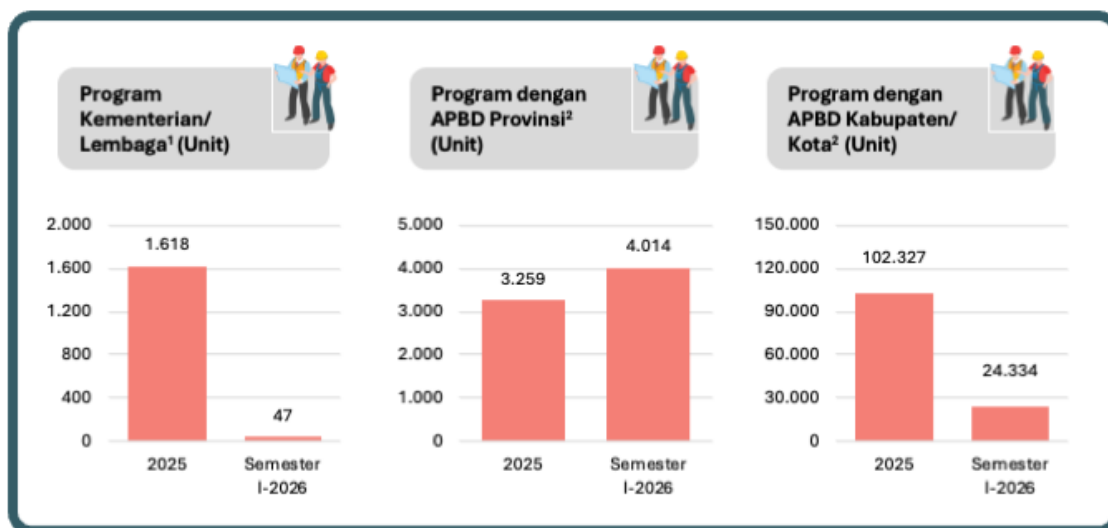
3.1 Capaian Program Perumahan oleh Pelaksana Negara

Pada tahun 2025, capaian program perumahan oleh pelaksana negara didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Capaian tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah sebanyak 45.073 unit, pembangunan rumah susun sebanyak 12.740 unit, rumah khusus sebanyak 476 unit, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 2.986 unit, bantuan sanitasi sebanyak 1.304 unit, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah oleh Kementerian/Lembaga sebanyak 1.618 unit, serta pembangunan perumahan dengan pembiayaan APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebanyak 3.259 unit dan 102.327 unit.



Sumber: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 5 Capaian BSPS, Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus, Bantuan PSU, serta Bantuan Sanitasi, 2025–Semester I-2026



Sumber: ¹Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
²Pemerintah Daerah

Gambar 6 Capaian Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah oleh Kementerian/Lembaga serta Pembangunan Perumahan dengan Pembiayaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, 2025–Semester I-2026

Pada semester I-2026, capaian program perumahan oleh pelaksana negara terdiri atas BSPS/Bedah Rumah sebanyak 88.635 unit, pembangunan rumah susun sebanyak 240 unit, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah oleh Kementerian/Lembaga sebanyak 47 unit, serta pembangunan perumahan dengan pembiayaan APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebanyak 4.014 unit dan 24.334 unit.

3.2 Capaian Fasilitas Pengembang Perumahan

Fasilitas pengembang perumahan merupakan salah satu instrumen penyediaan perumahan melalui dukungan pembiayaan dan insentif untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan maupun peningkatan kualitas rumah. Pada tahun 2025, capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.868 unit, Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebanyak 37.445 unit, pelonggaran Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWM BI) sebanyak 86.388 debitur, Pembiayaan Mikro Perumahan sebanyak 53.048 unit, dan Kredit Program Perumahan sebanyak 12.175 debitur. Pada semester I-2026, capaian FLPP sebanyak 91.531 unit, PPN DTP sebanyak 9.618 unit, pelonggaran GWM BI sebanyak 26.245 debitur, Pembiayaan Mikro Perumahan sebanyak 70.259 unit, dan Kredit Program Perumahan sebanyak 95.878 debitur.



Sumber: ¹BP Tapera

²Bank Indonesia

³Kementerian Keuangan

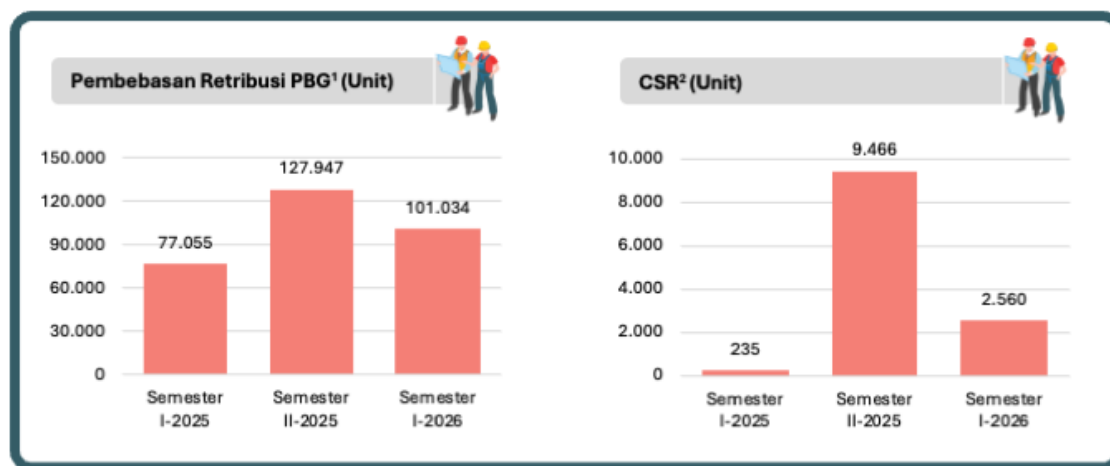
⁴PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Gambar 7 Capaian FLPP, Pelonggaran GWM BI, Penerapan PPN DTP, Pembiayaan Mikro Perumahan, dan Kredit Program Perumahan, 2025–Semester I-2026

3.3 Capaian Swadaya dan Gotong Royong

Pada capaian swadaya, dukungan pemerintah diberikan melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas rumah oleh masyarakat. Pada tahun 2025, capaian pembebasan retribusi PBG mencapai 205.002 unit, sedangkan pada semester I-2026 mencapai 101.034 unit.

Sementara itu, pada capaian gotong royong, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya berkontribusi terhadap pembangunan maupun peningkatan kualitas hunian. Capaian program tersebut mencapai 9.701 unit pada tahun 2025 dan 2.560 unit pada semester I-2026.



Sumber: ¹Kementerian Pekerjaan Umum

²Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 8 Capaian Pembebasan Retribusi PBG dan CSR, 2025–Semester I-2026

4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Data kondisi perumahan yang meliputi *backlog* 1, *backlog* 2, akses terhadap rumah layak huni, komponen penyusun rumah layak huni, penggunaan atap asbes, praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta akses terhadap listrik yang disajikan dalam BRS ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 dan Maret 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. *Backlog* 1 atau *backlog* kepemilikan rumah adalah rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain, atau dengan kata lain belum memiliki rumah.
3. *Backlog* 2 atau *backlog* kelayakhunian adalah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri, tetapi tidak layak huni. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap hunian layak apabila memenuhi empat komponen berikut:
 - a. Ketahanan bangunan (*durable housing*), dilihat dari bahan utama atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Bahan yang memenuhi syarat meliputi atap beton, genteng, seng, atau kayu/sirap; dinding tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, atau kayu/papan/batang kayu; serta lantai marmer/granit, keramik/ubin/tegel/teraso, parket/vinil/karpet, kayu/papan, atau semen/bata merah.
 - b. Kecukupan luas lantai (*sufficient living area*), diukur berdasarkan luas lantai bangunan tempat tinggal per kapita dengan batas minimal 7,20 m². Luas lantai per kapita dihitung dengan membagi total luas lantai bangunan tempat tinggal dengan jumlah anggota rumah tangga yang menempatinnya.
 - c. Akses terhadap sumber air minum layak, yaitu penggunaan sumber air minum utama berupa leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Apabila menggunakan air kemasan bermerek atau air isi ulang, sumber air utama untuk mandi, cuci, dan keperluan lainnya harus berupa leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.
 - d. Akses terhadap sanitasi layak, yaitu fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri oleh rumah tangga, bersama rumah tangga tertentu, atau di MCK komunal,

dengan kloset jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Khusus di daerah perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja dapat berupa lubang tanah.

4. Rumah layak huni merupakan hunian yang memenuhi seluruh komponen kelayakhunian, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.
5. Data capaian penyediaan perumahan tahun 2025 dan semester I-2026 bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP Tapera, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero). Capaian penyediaan perumahan mencakup pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian. Data disajikan untuk tahun 2025 dan semester I-2026 berdasarkan realisasi program yang tersedia dari masing-masing sumber data.

Tabel 1 Backlog 1 Menurut Provinsi, 2025–2026

Provinsi	Persentase		Jumlah (ribu rumah tangga)	
	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Aceh	13,00	12,54	182,98	180,15
2. Sumatera Utara	24,46	23,62	938,46	911,78
3. Sumatera Barat	24,28	23,82	341,88	338,74
4. Riau	19,04	17,88	351,99	338,24
5. Jambi	8,94	8,60	86,85	84,89
6. Sumatera Selatan	12,71	12,20	286,97	281,69
7. Bengkulu	8,24	7,79	44,63	43,07
8. Lampung	6,34	5,90	146,52	138,77
9. Kepulauan Bangka Belitung	7,90	7,63	32,44	31,56
10. Kepulauan Riau	22,28	21,29	158,00	157,57
11. DKI Jakarta	40,59	39,36	1.192,25	1.160,26
12. Jawa Barat	14,80	14,21	2.101,02	2.025,12
13. Jawa Tengah	8,04	7,63	774,25	738,53
14. DI Yogyakarta	13,92	13,14	174,81	167,05
15. Jawa Timur	7,48	7,23	849,21	829,08
16. Banten	11,44	10,65	399,53	380,68
17. Bali	11,67	10,52	144,62	131,89
18. Nusa Tenggara Barat	6,71	6,22	104,87	98,72
19. Nusa Tenggara Timur	7,22	6,65	95,10	89,22
20. Kalimantan Barat	6,53	6,09	85,36	80,98
21. Kalimantan Tengah	12,50	11,41	97,51	90,02
22. Kalimantan Selatan	12,98	11,37	160,65	142,53
23. Kalimantan Timur	18,25	17,53	182,28	178,20
24. Kalimantan Utara	16,96	15,90	30,50	29,74
25. Sulawesi Utara	15,58	15,07	106,66	104,72
26. Sulawesi Tengah	9,04	8,72	72,33	70,76
27. Sulawesi Selatan	9,65	9,18	211,05	202,12
28. Sulawesi Tenggara	7,09	5,94	48,63	41,35
29. Gorontalo	12,28	11,10	36,93	34,22
30. Sulawesi Barat	4,07	3,55	13,67	12,09
31. Maluku	11,07	10,55	45,29	44,20
32. Maluku Utara	6,19	5,62	18,51	17,40
33. Papua Barat	12,19	11,86	15,22	15,07
34. Papua Barat Daya	12,55	11,10	16,66	15,88
35. Papua	17,40	16,56	38,28	37,66
36. Papua Selatan	15,89	14,90	21,24	20,28
37. Papua Tengah	8,71	6,86	25,02	20,38
38. Papua Pegunungan	1,64	1,39	5,00	4,45
Indonesia	13,00	12,39	9.637,16	9.289,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 2 Backlog 2 Menurut Provinsi, 2025–2026

Provinsi	Persentase		Jumlah (ribu rumah tangga)	
	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Aceh	24,95	22,84	351,34	328,20
2. Sumatera Utara	16,02	15,82	614,66	610,97
3. Sumatera Barat	26,61	24,25	374,76	344,86
4. Riau	15,37	14,99	284,21	283,53
5. Jambi	28,16	24,87	273,44	245,43
6. Sumatera Selatan	28,16	26,51	635,71	612,22
7. Bengkulu	37,37	36,27	202,40	200,58
8. Lampung	28,00	26,86	647,27	631,33
9. Kepulauan Bangka Belitung	59,86	59,27	245,81	245,10
10. Kepulauan Riau	31,00	29,63	219,84	219,23
11. DKI Jakarta	28,05	27,88	823,78	821,84
12. Jawa Barat	33,00	31,77	4.684,98	4.527,67
13. Jawa Tengah	22,63	20,85	2.180,28	2.018,36
14. DI Yogyakarta	8,24	7,92	103,46	100,62
15. Jawa Timur	20,17	18,53	2.291,41	2.126,42
16. Banten	23,94	22,40	836,38	800,75
17. Bali	8,93	8,34	110,69	104,66
18. Nusa Tenggara Barat	25,43	24,72	397,20	392,12
19. Nusa Tenggara Timur	34,56	33,79	455,28	453,63
20. Kalimantan Barat	24,37	22,85	318,85	303,92
21. Kalimantan Tengah	28,94	27,57	225,82	217,54
22. Kalimantan Selatan	30,41	29,53	376,33	370,34
23. Kalimantan Timur	16,90	15,46	168,73	157,14
24. Kalimantan Utara	19,09	17,53	34,33	32,79
25. Sulawesi Utara	18,99	16,34	130,00	113,54
26. Sulawesi Tengah	30,81	29,07	246,54	235,78
27. Sulawesi Selatan	17,88	16,88	391,24	371,71
28. Sulawesi Tenggara	17,39	16,51	119,23	114,92
29. Gorontalo	20,28	18,16	60,96	55,98
30. Sulawesi Barat	31,11	29,38	104,35	100,18
31. Maluku	25,83	24,05	105,74	100,80
32. Maluku Utara	23,41	22,31	70,01	69,03
33. Papua Barat	34,72	33,18	43,34	42,16
34. Papua Barat Daya	36,35	31,61	48,24	45,23
35. Papua	32,51	28,82	71,54	65,53
36. Papua Selatan	44,85	45,07	59,93	61,31
37. Papua Tengah	66,93	63,66	192,27	189,11
38. Papua Pegunungan	89,14	91,76	271,60	294,63
Indonesia	25,33	24,03	18.771,91	18.009,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Komponen Penyusun, 2025

Provinsi		Komponen Penyusun			Rumah Layak Huni	
		Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas Lantai per Kapita	Akses terhadap Air Minum Layak		Akses terhadap Sanitasi Layak
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	97,88	93,73	92,06	82,21	71,15
2.	Sumatera Utara	96,37	92,99	93,24	87,47	76,89
3.	Sumatera Barat	99,02	94,63	87,26	74,59	63,70
4.	Riau	97,67	95,63	92,17	91,21	80,22
5.	Jambi	97,43	97,48	82,46	85,88	68,42
6.	Sumatera Selatan	92,19	90,88	86,82	85,50	65,74
7.	Bengkulu	97,41	95,52	70,47	85,75	57,97
8.	Lampung	90,48	98,46	85,13	87,29	68,78
9.	Kepulauan Bangka Belitung	42,38	97,87	83,54	96,45	33,13
10.	Kepulauan Riau	67,17	96,63	94,60	90,96	59,03
11.	DKI Jakarta	45,21	77,33	99,98	93,98	37,71
12.	Jawa Barat	80,63	95,11	95,84	76,20	58,46
13.	Jawa Tengah	89,14	98,40	95,73	87,51	74,74
14.	DI Yogyakarta	96,59	96,38	97,33	96,94	88,31
15.	Jawa Timur	90,08	97,31	97,30	88,26	76,68
16.	Banten	79,23	95,28	96,03	90,71	69,14
17.	Bali	93,88	92,82	98,75	98,20	85,73
18.	Nusa Tenggara Barat	88,27	91,09	96,29	88,29	71,49
19.	Nusa Tenggara Timur	84,87	93,45	89,86	80,80	62,27
20.	Kalimantan Barat	99,07	98,07	84,32	88,37	74,26
21.	Kalimantan Tengah	95,70	97,27	80,58	83,14	66,44
22.	Kalimantan Selatan	92,59	95,54	78,27	86,80	63,40
23.	Kalimantan Timur	97,19	94,91	88,45	92,57	76,87
24.	Kalimantan Utara	99,74	92,82	91,59	86,00	74,86
25.	Sulawesi Utara	96,32	94,13	94,86	87,72	76,84
26.	Sulawesi Tengah	96,24	90,37	87,55	79,62	65,19
27.	Sulawesi Selatan	93,85	94,46	93,25	94,19	78,67
28.	Sulawesi Tenggara	95,75	93,98	94,91	91,96	80,11
29.	Gorontalo	98,70	92,21	95,95	84,70	75,75
30.	Sulawesi Barat	96,06	92,23	83,00	85,98	66,28
31.	Maluku	94,86	90,40	92,83	83,09	69,15
32.	Maluku Utara	96,99	97,03	90,01	84,12	74,49
33.	Papua Barat	97,95	88,88	82,95	78,55	59,11
34.	Papua Barat Daya	97,71	88,26	80,64	79,56	57,76
35.	Papua	98,55	85,83	87,70	76,71	58,41
36.	Papua Selatan	90,92	81,34	71,28	65,06	43,88
37.	Papua Tengah	78,35	78,90	83,21	39,73	30,95
38.	Papua Pegunungan	50,20	72,02	32,89	16,34	9,53
Indonesia		87,10	94,66	93,22	85,37	68,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Komponen Penyusun, 2026

	Provinsi	Komponen Penyusun			Rumah Layak Huni
		Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas Lantai per Kapita	Akses terhadap Air Minum Layak	Akses terhadap Sanitasi Layak
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	97,67	93,83	92,99	84,19
2.	Sumatera Utara	96,37	93,42	93,75	88,80
3.	Sumatera Barat	98,94	94,75	88,99	76,46
4.	Riau	97,68	96,12	92,71	91,96
5.	Jambi	97,63	98,20	84,13	87,27
6.	Sumatera Selatan	92,88	91,59	87,37	87,39
7.	Bengkulu	98,07	96,47	70,53	86,86
8.	Lampung	90,87	98,14	85,52	88,75
9.	Kepulauan Bangka Belitung	42,99	97,98	84,97	96,77
10.	Kepulauan Riau	68,74	96,36	95,11	93,75
11.	DKI Jakarta	45,36	78,59	99,98	95,04
12.	Jawa Barat	80,88	94,75	96,00	77,74
13.	Jawa Tengah	89,93	98,46	95,98	89,34
14.	DI Yogyakarta	96,52	96,21	97,71	97,57
15.	Jawa Timur	90,59	97,53	97,77	89,42
16.	Banten	80,41	96,78	96,79	91,07
17.	Bali	94,32	92,95	99,00	98,60
18.	Nusa Tenggara Barat	88,71	91,51	96,76	90,24
19.	Nusa Tenggara Timur	83,53	94,44	90,74	82,22
20.	Kalimantan Barat	99,05	98,27	85,34	89,50
21.	Kalimantan Tengah	95,67	97,37	81,14	85,08
22.	Kalimantan Selatan	92,67	95,70	79,66	88,37
23.	Kalimantan Timur	98,04	95,05	89,96	93,64
24.	Kalimantan Utara	99,43	95,31	92,97	86,07
25.	Sulawesi Utara	97,02	94,49	95,03	89,64
26.	Sulawesi Tengah	96,99	90,96	88,44	81,58
27.	Sulawesi Selatan	94,29	94,97	94,13	94,64
28.	Sulawesi Tenggara	95,71	94,20	96,01	93,03
29.	Gorontalo	98,95	94,40	97,26	85,82
30.	Sulawesi Barat	96,52	92,38	84,19	86,87
31.	Maluku	95,52	90,39	94,46	84,62
32.	Maluku Utara	97,26	97,05	90,70	85,77
33.	Papua Barat	98,13	88,67	84,88	80,62
34.	Papua Barat Daya	97,65	88,23	81,77	82,02
35.	Papua	99,04	86,62	88,98	78,10
36.	Papua Selatan	92,78	82,25	73,51	66,85
37.	Papua Tengah	79,13	79,33	83,94	41,19
38.	Papua Pegunungan	51,48	74,44	33,32	17,98
	Indonesia	87,52	94,91	93,71	86,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret

Tabel 5 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Berupa Asbes serta Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 2025–2026

Provinsi		Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Berupa Asbes		Praktik BABS	
		2025	2026	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	0,81	0,89	6,57	5,23
2.	Sumatera Utara	2,13	1,91	3,58	3,04
3.	Sumatera Barat	0,49	0,52	5,25	5,01
4.	Riau	1,66	1,26	1,00	0,86
5.	Jambi	2,29	1,79	3,75	3,25
6.	Sumatera Selatan	6,53	5,62	3,00	2,65
7.	Bengkulu	1,86	1,39	2,74	2,36
8.	Lampung	8,76	8,56	0,77	0,76
9.	Kepulauan Bangka Belitung	57,47	56,70	1,30	1,25
10.	Kepulauan Riau	29,90	29,79	0,26	0,20
11.	DKI Jakarta	54,77	54,59	NA	NA
12.	Jawa Barat	15,59	15,02	0,80	0,75
13.	Jawa Tengah	6,12	5,70	1,31	1,26
14.	DI Yogyakarta	2,92	2,93	0,39	0,29
15.	Jawa Timur	6,43	6,18	3,60	3,34
16.	Banten	17,81	16,52	1,46	1,42
17.	Bali	6,05	5,30	1,16	0,94
18.	Nusa Tenggara Barat	10,23	9,51	4,11	3,88
19.	Nusa Tenggara Timur	0,31	0,38	3,61	3,11
20.	Kalimantan Barat	0,59	0,58	2,50	2,21
21.	Kalimantan Tengah	4,14	3,69	0,71	0,61
22.	Kalimantan Selatan	6,47	6,40	0,44	0,35
23.	Kalimantan Timur	2,54	1,78	0,40	0,35
24.	Kalimantan Utara	NA	NA	1,73	1,40
25.	Sulawesi Utara	1,72	1,13	3,31	3,08
26.	Sulawesi Tengah	0,39	0,41	8,05	7,76
27.	Sulawesi Selatan	0,99	1,07	1,35	1,24
28.	Sulawesi Tenggara	2,84	2,71	2,10	1,89
29.	Gorontalo	NA	NA	4,79	4,59
30.	Sulawesi Barat	0,83	0,79	6,03	5,30
31.	Maluku	2,32	2,36	5,93	5,26
32.	Maluku Utara	0,19	0,78	2,36	2,02
33.	Papua Barat	0,89	0,52	3,01	2,65
34.	Papua Barat Daya	0,72	0,75	2,24	2,06
35.	Papua	0,91	0,27	2,57	2,17
36.	Papua Selatan	1,11	0,65	16,46	15,01
37.	Papua Tengah	0,36	0,33	21,77	18,66
38.	Papua Pegunungan	0,55	0,55	33,19	31,61
Indonesia		9,75	9,34	2,35	2,15

Catatan : NA (*Not Applicable*) atau data tidak dapat ditampilkan karena RSE>50 persen sehingga estimasi dianggap tidak akurat.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Utama Penerangan, 2025–2026

Provinsi		Listrik PLN		Listrik Non PLN		Bukan Listrik	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	99,49	99,95	0,48	NA	NA	NA
2.	Sumatera Utara	99,28	99,35	0,44	0,39	0,28	0,25
3.	Sumatera Barat	99,16	99,22	0,31	0,63	0,53	0,16
4.	Riau	97,87	97,36	1,84	2,48	0,29	0,16
5.	Jambi	98,40	98,63	1,28	1,14	0,32	0,24
6.	Sumatera Selatan	96,70	97,84	3,08	2,05	0,23	0,11
7.	Bengkulu	99,67	99,76	0,32	0,18	NA	NA
8.	Lampung	99,32	99,47	0,64	0,50	NA	0,03
9.	Kepulauan Bangka Belitung	99,60	99,98	0,34	NA	NA	NA
10.	Kepulauan Riau	98,81	99,58	1,14	0,39	0,04	NA
11.	DKI Jakarta	99,84	99,86	NA	NA	–	NA
12.	Jawa Barat	99,96	99,92	NA	0,07	NA	NA
13.	Jawa Tengah	100,00	99,97	–	0,03	NA	NA
14.	DI Yogyakarta	100,00	99,96	–	NA	–	–
15.	Jawa Timur	99,82	99,79	0,17	0,21	NA	NA
16.	Banten	99,80	99,83	0,06	0,07	0,14	NA
17.	Bali	99,98	99,99	–	–	NA	NA
18.	Nusa Tenggara Barat	99,73	99,92	0,27	NA	NA	NA
19.	Nusa Tenggara Timur	92,83	94,11	5,23	3,97	1,94	1,91
20.	Kalimantan Barat	94,06	93,37	5,11	5,81	0,84	0,82
21.	Kalimantan Tengah	90,69	94,02	8,95	5,54	0,35	0,44
22.	Kalimantan Selatan	99,24	99,74	0,62	0,23	0,14	NA
23.	Kalimantan Timur	97,77	97,63	2,20	2,35	0,03	0,02
24.	Kalimantan Utara	97,73	98,14	2,16	1,82	NA	NA
25.	Sulawesi Utara	99,78	99,89	0,06	0,04	0,16	0,06
26.	Sulawesi Tengah	96,77	97,38	1,93	2,10	1,30	0,52
27.	Sulawesi Selatan	98,53	99,14	1,34	0,80	0,14	0,07
28.	Sulawesi Tenggara	98,32	99,37	1,63	0,54	0,06	0,09
29.	Gorontalo	99,58	99,84	NA	NA	0,33	NA
30.	Sulawesi Barat	97,10	95,94	2,58	3,84	0,32	0,22
31.	Maluku	96,66	96,97	2,08	1,80	1,26	1,23
32.	Maluku Utara	96,12	97,28	3,15	2,20	0,74	0,52
33.	Papua Barat	84,16	86,02	12,43	10,49	3,41	3,49
34.	Papua Barat Daya	94,09	91,14	4,46	7,56	1,44	1,30
35.	Papua	91,78	93,41	4,87	3,83	3,35	2,75
36.	Papua Selatan	73,62	75,22	9,99	9,21	16,39	15,58
37.	Papua Tengah	35,67	45,22	31,80	24,20	32,54	30,58
38.	Papua Pegunungan	20,78	22,42	48,09	46,59	31,12	31,00
Indonesia		98,46	98,62	1,09	0,97	0,45	0,41

Catatan : –, bernilai nol mutlak atau tidak ada data

NA (*Not Applicable*) atau data tidak dapat ditampilkan karena RSE>50 persen sehingga estimasi dianggap tidak akurat.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 7 Kinerja Sektor Perumahan, 2025–Semester I-2026

Rincian	Satuan	2025			Semester I-2026
		Semester I-2025	Semester II-2025	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Negara					
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah ¹	Unit	–	45.073	45.073	88.635
Rumah Susun ¹	Unit	3.978	8.762	12.740	240
Rumah Khusus ¹	Unit	–	476	476	–
Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ¹	Unit	–	2.986	2.986	–
Bantuan Sanitasi ¹	Unit	–	1.304	1.304	–
Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah oleh Kementerian/ Lembaga ¹	Unit	...	...	1.618	47
Pembangunan Perumahan dengan Pembiayaan dari APBD Provinsi ²	Unit	...	...	3.259	4.014
Pembangunan Perumahan dengan Pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota ²	Unit	...	...	102.327	24.334
Pengembang Perumahan					
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ³	Unit	120.976	157.892	278.868	91.531
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) ⁴	Unit	...	...	37.445	9.618
Pelonggaran Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWM BI) ⁵	Debitur	34.396	51.992	86.388	26.245
Pembiayaan Mikro Perumahan ⁶	Unit	...	...	53.048	70.259
Kredit Program Perumahan ⁴	Debitur	–	12.175	12.175	95.878
Swadaya					
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ⁷	Unit	77.055	127.947	205.002	101.034
Gotong-Royong					
Program CSR maupun Berbagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Lainnya ¹	Unit	235	9.466	9.701	2.560

Catatan: ..., data tidak tersedia

–, bernilai nol mutlak atau tidak ada data

Sumber: ¹Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

²Pemerintah Daerah

³BP Tapera

⁴Kementerian Keuangan

⁵Bank Indonesia

⁶PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

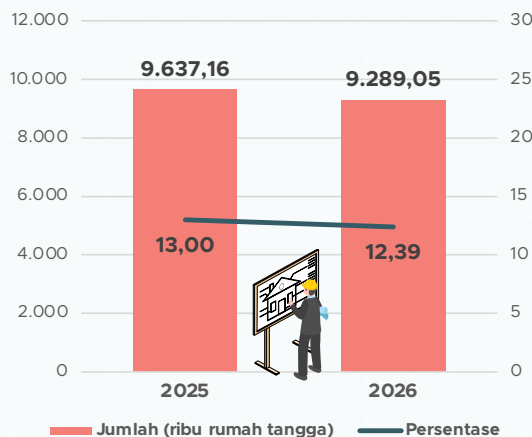
⁷Kementerian Pekerjaan Umum

BACKLOG PERUMAHAN DAN CAPAIAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DI INDONESIA, 2025–SEMESTER I-2026

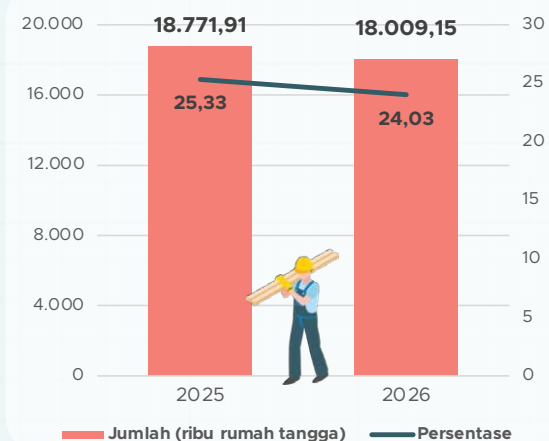


Berita Resmi Statistik No. 84/08/Th XXIX, 31 Agustus 2026

Backlog 1 (Backlog Kepemilikan), 2025–2026



Backlog 2 (Backlog Kelayakhunian), 2025–2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Capaian Pembangunan Perumahan, 2025–Semester I-2026

Rincian	Satuan	2025	Semester I-2026
Negara			
BSPS/Bedah Rumah ¹	Unit	45.073	88.635
Rumah Susun ¹	Unit	12.740	240
Rumah Khusus ¹	Unit	476	–
Bantuan PSU ¹	Unit	2.986	–
Bantuan Sanitasi ¹	Unit	1.304	–
Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah oleh Kementerian/Lembaga ¹	Unit	1.618	47
Pembangunan Perumahan dengan Pembiayaan dari APBD Provinsi ²	Unit	3.259	4.014
Pembangunan Perumahan dengan Pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota ²	Unit	102.327	24.334
Pengembang Perumahan			
FLPP ³	Unit	278.868	91.531
PPN DTP ⁴	Unit	37.445	9.618
GWM BI ⁵	Debitur	86.388	26.245
Pembiayaan Mikro Perumahan ⁶	Unit	53.048	70.259
Kredit Program Perumahan ⁴	Debitur	12.175	95.878
Swadaya			
Pembebasan Retribusi PBG ⁷	Unit	205.002	101.034
Gotong-Royong			
Program CSR maupun Berbagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Lainnya ¹	Unit	9.701	2.560

Catatan: –, bernilai nol mutlak atau tidak ada data

Sumber: ¹Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ²Pemerintah Daerah, ³BP Tapera, ⁴Kementerian Keuangan, ⁵Bank Indonesia, ⁶PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), ⁷Kementerian Pekerjaan Umum



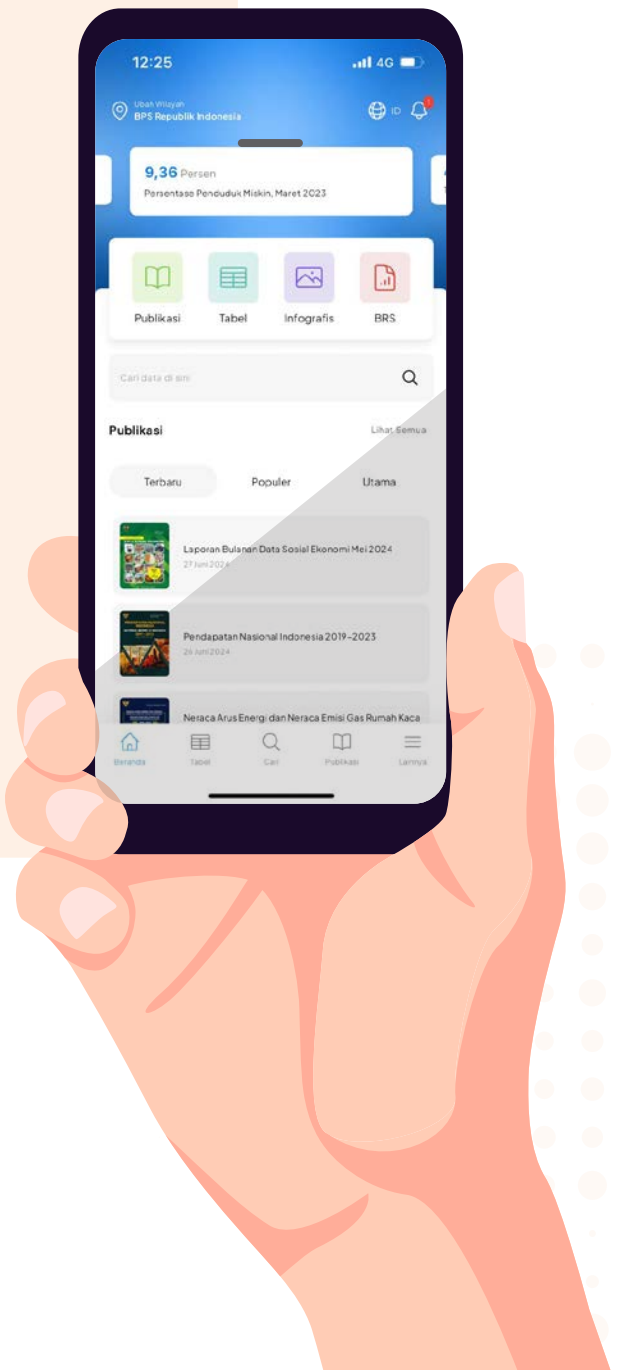
BADAN PUSAT STATISTIK
https://www.bps.go.id

Gambar 9 Infografis Backlog Perumahan dan Capaian Penyediaan Perumahan di Indonesia, 2025–Semester I 2026

AllStats BPS

untuk mengakses
data secara cepat di
gawai Anda

Publikasi, Berita Resmi Statistik,
Tabel Dinamis Data Series dan
Pelayanan Statistik Terpadu





Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Dr. Budi Setiawan, S.ST, M.Si.
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat

☎ (021) 3810291-4, Ext. 4200

✉ boedhee@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsq@bps.go.id

